



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DPRD

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kami panjatkan, karena berkat rahmat dan HidayahNya sehingga Perubahan Rencana Kerja Instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 ini pada prinsipnya merupakan rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Pada Tahun 2022 untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja 2022 ini selanjutnya.

Akhirnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2022 kami persembahkan dengan segala Kerendahan hati. Semoga berguna dan mencapai tujuannya. Amin...

Sidenreng Rappang, 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DPRD KAB. SIDRAP

A.MUH. FAISAL, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19650809 199403 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	3
1.4 Maksud dan Tujuan RENJA	4
1.5 Sistematika Penulisan RENJA	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 ..	7
II.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	23
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	27
BAB IV PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi faktual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat yang hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur dan tepat waktu. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan Top-Down/Bottom-Up. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023.

Untuk menjamin keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tahun berjalan, maka perlu disusun Perubahan RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 dan juga merupakan acuan dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran diawali dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dalam beberapa program dan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan.

I.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang –undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Caera Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor...);
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 24);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, substansi dokumen ini harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah sebagai pedoman untuk penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah mewujudkan konsistensi dan sinergi perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan hukum

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya

1.4. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2022 .

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat DPRD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA Sekretariat DPRD 2018-2023

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Sekretariat DPRD Tahun 2022 , mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
Berisikan uraian mengenai perkembangan tingkat kinerja pelayanan permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan Pendanaannya

Bab IV Penutup

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP TAHUN 2022

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat 1 menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah dan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Sedangkan untuk penambahan program karena adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan, pagu indikatif serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Triwulan II Tahun 2022, meliputi pagu indikatif dan realisasi anggaran, capaian program kegiatan dan sub kegiatan, capaian kinerja pendanaan, serta rata-rata capaian keluaran dan predikat kinerja yang disajikan berdasarkan perangkat daerah disertai permasalahan, upaya penyelesaian dan rekomendasi pelaksanaan RKPD triwulan selanjutnya

Dari capaian kinerja Triwulan II Sekretariat DPRD memiliki rata-rata capaian kinerja rendah dan rata-rata capaian anggaran sangat rendah. Hal ini dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang dialokasikan pada triwulan II, pelaksanaannya tertunda pada triwulan III dan atau

IV . Untuk lebih jelasnya mengenai Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap s/d Triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1

KODE	OPD/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA PD S/D RENJA PD TAHUN 2021	Target dan Realisasi Kinerja PD pada tahun 2022				Perkiraan Realisasi capaian target	
						Target Renja	Realis asi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9=(9/4)	10=(9/4)	1	
4.02	SEKRETARIAT DPRD		100	96.78	100	29.01	0.29	126.08	1.26		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD	100 %	96.60	100	27.79	0.28	124.67	1.25		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Peraturan Daerah yang difasilitasi Pembahasannya	100 %	77.10	100	-	-	77.10	0.77		
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan	20 Ranperda	11.00	20			11.00	0.55		
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan	Jumlah Pembahasan	20 kali	11.00	95	-	-	11.00	0.55		

	Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	akademik yang diterbitkan															
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang diterbitkan	1	Dok							1				-	-	-
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan anggaran yang terlaksana	100	%	100.00	100									-	100.00	1.00
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS	1	Kali	1	1					1				-	1	1
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	1	Kali	1	1					1				-	1	1
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD	1	Kali	1	1					1				-	1	1
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan	1	Kali	1	1					1				-	1	1
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah pembahasan Laporan Semester yang terlaksana	1	Kali	1	1					1				-	1	1
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Kali	1	1					1				-	-	1

4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen naskah akademik yang diterbitkan	4	Dok	4.00	4	-	-	4.00	1.00
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang diterbitkan	1	Dok		1	-	-		-
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan anggaran yang terlaksana	100	%	100.00	100	-	-	100.00	1.00
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS	1	Kali	1	1	-	-	1	1
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	1	Kali	1	1	-	-	1	1
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD	1	Kali	1	1	-	-	1	1
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan	1	Kali	1	1	-	-	1	1
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah pembahasan Laporan Semester yang terlaksana	1	Kali	1	1	-	-	1	1
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Kali	1	1	-	-	-	1

	Pemerintahan	pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang terlaksana										
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	3	Kali				3	1.00	4.00	1.33		
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3	Kali				3	-	-	-		
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3	Kali				3	0.67	2.67	0.89		
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3	Kali				3	-	-	-		
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3	Kali									
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh	1	Kali									

Aspirasi Masyarakat	aspirasi masyarakat	12	Kali	12.00	12	1.77	0.15	13.92	1.16
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah								
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1	Dok	-	1		-	-	-
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	3	Kali	3.00	3	-	-	3.00	1.00
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			100.00	100		-	100.00	
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	1	Dok		1		-	-	-
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	2	kali		2		-	-	-
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah								
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah								
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi								
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	100	%	100.00	100		-	100.00	1.00
	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana								

Tugas DPRD	pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana								
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD								
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	15	Kali			15	-	-	-
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD								
..01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	%	72.76					
..01.2.01	XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	100.00		100	-	100.00	1.00
..01.2.01.01	XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dok	1.00		1	-	1.00	1.00
..01.2.01.02	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	1	Dok	1.00		1	-	1.00	1.00
..01.2.01.03	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1	Dok	1.00		1	-	1.00	1.00

..01.2.01.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	1.00	1	-	1.00	1.00
..01.2.01.06	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dok	1.00	1	-	1.00	1.00
..01.2.02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%	100.00	100	-	100.00	1.00
..01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	12.00	14	0.21	15.21	1.09
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian keuangan SKPD	12	Bulan	12.00	12	-	12.00	1.00
..01.2.02.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	Lap	1.00	1	-	1.00	1.00
..01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran/tri wulan SKPD	14	Lap	14.00	14	-	14.00	1.00

01.2.06.00	Pengadaan XXX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang- undangan	300	Buku					
01.2.06.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang berkunjung	1.200	Orang	1.200.00		-	1.200.00	1.00
01.2.07	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	%	100.00		-	100.00	1.00
01.2.07.02	XXX Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
01.2.07.06	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	35	unit	35.00		-	35.00	1.00
01.2.07.09	XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kantor dan Rumah Jabatan yang dipelihara							
01.2.07.10	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	4		4.00				
01.2.07.11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

..01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kantor dan Rumah Jabatan yang dipelihara	4	Unit	4.00	4	1	0.25	5.25	1.31
..01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor dan rumah jabatan yang dipelihara	110	Unit		110				
..01.2.09.11	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi								
..01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			%		100		-	-	-
..01.2.15.01	XXX Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyediaan administrasi keuangan DPRD	12	Bulan	12.00	12	6	0.50	18.50	1.54
..01.2.15.02	XXX Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	210	Psg	175.00	210		-	175.00	0.83
..01.2.15.03	XXX Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Check Up	35	Org	35.00	35		-	35.00	1.00

01.2.16.03	XXX Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	12	Kall	12.00	12	6	0.50	18.50	1.54
01.2.16.04	XXX Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12	Bulan	12.00	12	6	0.50	18.50	1.54

II.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan di tahun 2022 yang tidak mencapai target kinerja sesuai yang direncanakan adalah :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

II.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Program kegiatan yang memenuhi target kinerja di Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

II.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan di tahun 2022 dan di akhir triwulan II tahun 2022 tidak ada yang melebihi target kinerja. Sekretariat DPRD memiliki rata-rata capaian kinerja rendah dan rata-rata capaian anggaran sangat rendah.

II.1.4 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program kegiatan.

Adapun Penyebab tidak tercapainya target kinerja di akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah. Kegiatannya tidak terlaksana dikarenakan padatnya kegiatan Anggota DPRD serta kegiatannya ditunda dan dilaksanakan pada Triwulan III

- Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan, Realisasinya rendah dikarenakan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya Pembatasan social.

II.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dampak yang timbul terhadap capaian program yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah :

- a. Terdapat kegiatan yang capaian kinerjanya nol dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan
- b. Penyerapan anggaran tidak seoptimal capaian kinerja dikarenakan nilai realisasi belanja lebih kecil dari pagu anggaran dalam DPA (pelaksanaan kegiatan berdasarkan riil cost)

II.1.6 Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Dalam rangka efektifitas realisasi anggaran dalam pencapaian target kinerja sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, maka kebijakan yang diambil untuk meminimalisasi penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan yang belum terealisasi pada triwulan berikutnya berdasarkan alokasi anggaran dalam DPA
- b. Mengalokasikan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan tepat pada DPA sesuai dengan skala prioritas, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal
- c. Meningkatkan persentase Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat
- d. Meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- e. Mengatur jadwal pelaksanaan rapat-rapat yang lebih efektif

II. 2 Isu -Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

II.2.1 Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang menguji indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2008, sebagai berikut :

- a. Penyelenggara administrasi Kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat dari indikator kinerja;

- Persentase Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD

II.2.2 Isu-isu Strategis Penyelenggara Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

Dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD, diperlukan peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kab. Sidrap melalui kapasitas SDM, sarana dan

prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
- 3) Pemanfaatan teknologi Informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
- 4) Peningkatan kualitas perencanaan dalam penyusunan / perancangan peraturan daerah, peraturan DPRD dan Keputusan DPRD.

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan indentifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal dapat dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isi-isu strategis yaitu sebagai berikut :

- a. Masih banyak Rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan tidak tepat waktu.
- b. Manajemen penentuan jadwal rapat belum dilakukan secara baik

II.2.3. Dampak Terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Telah dilaksanakan Penyusunan rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kab. Sidrap yang merupakan penjabaran yang lebih detail terhadap perencanaan Pembangunan Daerah sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra maupun Renja sejalan dengan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tahun 2018–2023, dengan demikian sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mencerminkan misi Pemerintahan Kabupaten yaitu Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

II.2.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Beberapa hal yang menjadi Tantangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan pelayanan atau memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1. Tuntutan Pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum lengkap dan memadai;
3. Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD dan Kegiatan-kegiatan DPRD yang bersifat Tentatif
4. Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Kode Etik dan tata tertib DPRD;
5. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi Internal dan Eksternal antar Perangkat Daerah ;
6. Peningkatan supremasi hukum.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan pelayanan atau memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1. Kerjasama dengan Perangkat Daerah, Instansi terkait, Anggota Forkopimda untuk dialog atau dengar pendapat dalam hal penerimaan Aspirasi dari masyarakat;
2. Komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Jadwal Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah;
3. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
5. Perkembangan Teknologi

II.2.5. Isu-isu penting dan catatan strategis dalam perumusan program dan kegiatan

Isu-isu penting dan catatan strategis yang terkait dengan dinamika lingkungan serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga sistem pendukung DPRD, maka menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam satu tahun kedepan adalah :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diperlukan sistem administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mengikuti perkembangan teknologi, dengan mengikuti perkembangan teknologi diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih efisien dan efektif.

2. Pemanapan Peran Sekretariat DPRD sebagai Fasilitator dan Mediator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD perlu lebih ditingkatkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang harus selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan sinersitas kelembagaan di daerah.

3. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secara transparan dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD serta dilaksanakan secara transparan dengan demikian, perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran memiliki Program Rutin dan Program Pendukung. Program Rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan terbagi dalam 10 kegiatan, Program. Untuk Program diluar program rutin yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari 6 kegiatan. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

SKPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP

**Rencana Kerja Perubahan
Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2022**

4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen data tertib DPRD yang diterbitkan	Pangkajene	1 Dokumen	0	Pangkajene	1 Dokumen	0
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan anggaran yang terlaksana	Pangkajene	100%	170.500.000	Pangkajene	100%	171.111.000
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS	Pangkajene	1 Kali	19.500.000	Pangkajene	1 Kali	19.500.000
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Pangkajene	1 Kali	19.500.000	Pangkajene	1 Kali	19.500.000
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD	Pangkajene	1 Kali	46.500.000	Pangkajene	1 Kali	57.477.000
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan	Pangkajene	1 Kali	47.500.000	Pangkajene	1 Kali	37.164.000
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah pembahasan Laporan Semester yang terlaksana	Pangkajene	1 Kali	-	Pangkajene	1 Kali	-
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pangkajene	1 Kali	37.500.000	Pangkajene	1 Kali	37.500.000
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	Pangkajene	100%	147.500.000	Pangkajene	100%	144.807.000
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang dihasilkan	Pangkajene	3 Kali	17.500.000	Pangkajene	3 Kali	17.500.000
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang dihasilkan	Pangkajene	3 Kali	19.500.000	Pangkajene	3 Kali	23.947.000

4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Pangkajene	3 Kali	17.500.000	Pangkajene	3 Kali	17.500.000
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang dihasilkan	Pangkajene	3 Kali	19.500.000	Pangkajene	3 Kali	23.607.000
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang dihasilkan	Pangkajene	3 Kali	-	Pangkajene	3 Kali	-
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang dihasilkan	Pangkajene	1 Kali	-	Pangkajene	1 Kali	-
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran yang dihasilkan	Pangkajene	1 Kali	17.500.000	Pangkajene	1 Kali	37.587.000
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pangkajene	1 Kali	56.000.000	Pangkajene	1 Kali	24.666.000
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Pangkajene	100%	3.069.610.000	Pangkajene	100%	4.980.321.000
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD		Pangkajene			Pangkajene		

		URAI yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene				Pangkajene		
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan Dokumentasi Dewan yang terlaksana	Pangkajene	12 Kali	2.196.000.000		Pangkajene	12 Kali	3.603.013.000
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Tim Ahli yang disediakan	Pangkajene	2 Orang	-		Pangkajene	2 Orang	-
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Penyediaan tenaga ahli Fraksi DPRD yang disediakan	Pangkajene	7 Orang	126.000.000		Pangkajene	7 Orang	126.000.000
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Pangkajene				Pangkajene		
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program kerja DPRD yang dihasilkan	Pangkajene	1 Dokumen	20.632.000		Pangkajene	1 Dokumen	26.308.000
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Pangkajene	100%	2.752.334.000		Pangkajene	100%	3.474.137.000
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang difasilitasi	Pangkajene	12 Kali	112.334.000		Pangkajene	12 Kali	311.894.000
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Pangkajene	1 Dokumen	-		Pangkajene	1 Dokumen	-
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen pelaksanaan Reses	Pangkajene	3 Kali	2.640.000.000		Pangkajene	3 Kali	3.162.243.000
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Pangkajene		2.500.000		Pangkajene		-

	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Rapat Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan	Pangkajene	2 Kali		Pangkajene	2 Kali	
4.02.02.2.06.02	Pembahasan Kerja Sama Daerah			-			-	
02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah							
02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi							
02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana	Pangkajene	100%	7.000.000.000	Pangkajene	100%	11.304.884.000
02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana	Pangkajene	60 Kali	7.000.000.000	Pangkajene	60 Kali	11.304.884.000
02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD							
02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Rapat Pelaksanaan tugas Badan Musyawarah yang difasilitasi	Pangkajene	15 Kali	-	Pangkajene	15 Kali	-
02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD							
01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.318.024.538				19.472.732.000
01.2.01	XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pangkajene	100%	26.718.000	Pangkajene	100%	22.728.000

..01.2.01.01	Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene	1 Dokumen	5.435.000	Pangkajene	1 Dokumen	3.000.000	
..01.2.01.02	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Pangkajene	1 Dokumen	6.533.000	Pangkajene	1 Dokumen	6.325.000	
..01.2.01.03	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pangkajene	1 Dokumen	4.920.000	Pangkajene	1 Dokumen	4.918.000	
..01.2.01.04	XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Pangkajene	1 Dokumen	2.300.000	Pangkajene	1 Dokumen	2.500.000	
..01.2.01.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pangkajene	1 Dokumen	2.500.000	Pangkajene	1 Dokumen	3.500.000	
..01.2.01.06	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkajene	1 Dokumen	5.030.000	Pangkajene	1 Dokumen	2.485.000	
..01.2.02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pangkajene	100%	2.811.064.538	Pangkajene	100%	2.582.666.900	
..01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene	14 Bulan	2.816.534.538	Pangkajene	14 Bulan	2.468.520.900	
..01.2.02.03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian keuangan SKPD	Pangkajene	12 Bulan	55.600.000	Pangkajene	12 Bulan	107.785.000	
..01.2.02.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Pangkajene	1 Laporan	2.421.000	Pangkajene	1 Laporan	1.960.000	
..01.2.02.07	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran/triwulan SKPD	Pangkajene	14 Laporan	6.500.000	Pangkajene	14 Laporan	4.401.000	
..01.2.03	XXX Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Pangkajene	100%	-	Pangkajene	100%	-	

01.2.07.02	Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Pangkajene	35 Unit	Pangkajene	35 Unit	Pangkajene
01.2.07.06	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Pangkajene	35 Unit	145.000.000	Pangkajene	
01.2.07.09	XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kantor dan Rumah Jabatan yang dipelihara	Pangkajene			Pangkajene	
01.2.07.10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	Pangkajene		170.000.000	Pangkajene	203.156.400
01.2.07.11	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pangkajene			Pangkajene	
01.2.08	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pangkajene	100%	1.237.874.000	Pangkajene	1.105.580.600
01.2.08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen bermaterai	Pangkajene	1650 Lembar	16.500.000	Pangkajene	19.060.000
01.2.08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Pembayaran Telepon, air dan Listrik	Pangkajene	12 Bulan	409.224.000	Pangkajene	288.636.000
01.2.08.03	XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkajene	12 Bulan	74.860.000	Pangkajene	74.510.000
01.2.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkajene	12 Bulan	737.290.000	Pangkajene	723.374.600
01.2.09	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pangkajene	100%	912.177.000	Pangkajene	848.567.100
01.2.09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Pangkajene	7 unit	40.660.000	Pangkajene	62.910.000

.01.2.09.02	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Pangkajene	28 Unit	390.450.000	Pangkajene	28 Unit	274.397.100	
.01.2.09.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kantor dan Rumah Jabatan yang dipelihara	Pangkajene	4 unit	328.607.000	Pangkajene	4 unit	511.260.000	
.01.2.09.10	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor dan rumah jabatan yang dipelihara	Pangkajene	116 Unit	152.460.000	Pangkajene	116 Unit	152.460.000	
.01.2.09.11	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	Pangkajene			Pangkajene			
.01.2.15	XXX Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Pangkajene	100%	15.175.427.000	Pangkajene	100%	13.016.698.000	
.01.2.15.01	XXX Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyediaan administrasi keuangan DPRD	Pangkajene	12 Bulan	14.423.050.000	Pangkajene	12 Bulan	12.264.698.000	
.01.2.15.02	XXX Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	Pangkajene	210 Pasang	582.000.000	Pangkajene	210 Pasang	559.500.000	
.01.2.15.03	XXX Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Check Up	Pangkajene	35 Orang	170.377.000	Pangkajene	35 Orang	192.500.000	
.01.2.16	XXX Layanan Administrasi DPRD		Pangkajene	100%	1.124.000.000	Pangkajene	100%	1.045.873.000	
.01.2.16.03	XXX Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	Pangkajene	12 Kali	212.000.000	Pangkajene	12 Kali	133.873.000	
.01.2.16.04	XXX Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Pangkajene	12 Bulan	912.000.000	Pangkajene	12 Bulan	912.000.000	

Rencana Kerja Perubahan
Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2022

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Ini juga merupakan pedoman menuju kebersamaan dan gotong royong dalam melaksanakan kegiatan tahun 2022 yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkualitas, partisipatif, mandiri dan sejahtera.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami mohon masukan untuk perbaikan penyusunan Rencana Kerja ini, seandainya Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 yang disusun ini masih jauh dari sempurna untuk itu kritik dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan penyusunan Renja tahun berikutnya.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan dan pelaksanaan Program Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sidenreng Rappang, 22 Agustus 2022
SEKRETARIS DPRD KAB. SIDRAP

A. MUH. FAISAL, SH. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19650809 199403 1 006